

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah otonom adalah wilayah yang diberikan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri, sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, daerah otonom diartikan sebagai suatu entitas masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta memiliki hak dan wewenang dalam mengatur serta mengurus kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya secara mandiri. Pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan otonomi kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur wilayahnya secara mandiri, termasuk dalam merumuskan kebijakan atau peraturan yang bertujuan mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional (Primahadi & Kurniawan, 2021).

Ditinjau dari aspek kewenangan, otonomi daerah didefinisikan sebagai kewenangan yang dimiliki suatu daerah secara mandiri, yang berarti bahwa daerah tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri (Dunggio & Jasin, 2019). Dalam kapasitasnya sebagai daerah otonom, setiap wilayah dituntut untuk mengoptimalkan serta mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki, salah satunya melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini penting dilakukan agar suatu daerah tidak bergantung

pada dana transfer dari pemerintah pusat, melainkan mampu membiayai pembangunan secara mandiri sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu salah satu sumber pemasukan yang diperoleh langsung oleh suatu daerah dan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PAD mencakup pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antara berbagai komponen PAD, pajak daerah menjadi penyumbang terbesar. Undang-Undang yang sama menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan kewajiban yang bersifat memaksa bagi setiap wajib pajak kepada pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah. Sebagai komponen utama dalam struktur penerimaan daerah, pajak daerah memiliki peran yang krusial dalam menunjang kemandirian fiskal suatu wilayah.

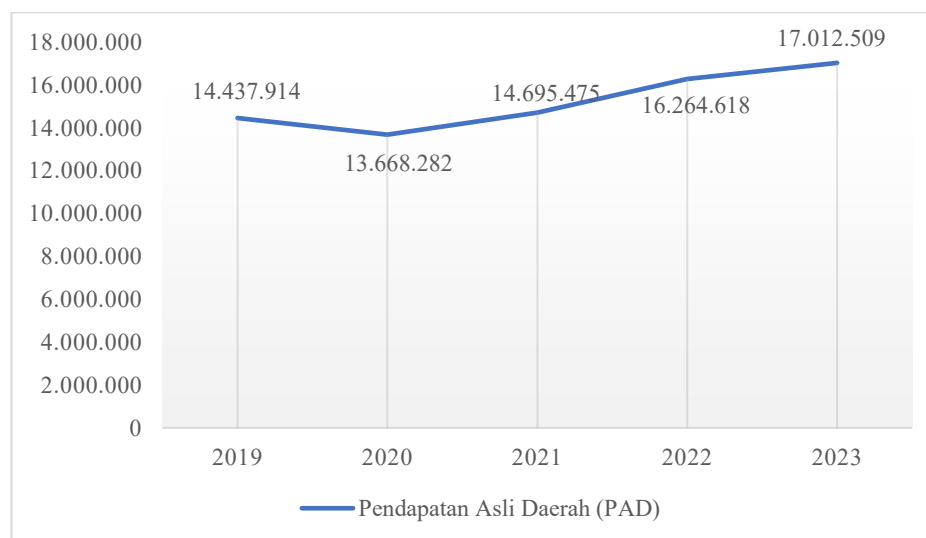
Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas hidup dan meminimalisir ketergantungan terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah, misalnya dengan meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan penerimaan BUMD dengan memperkuat pengelolaannya, serta perbaikan administrasi keuangan daerah (Pasaribu & Woyanti, 2024). Pendapatan daerah dalam suatu wilayah berbeda-beda, bergantung pada kekayaan sumber dayanya dan optimalisasi manajemennya (Khoir dalam Rahayu, 2020).

Dengan begitu diharapkan setiap daerah dapat berkontribusi untuk meningkatkan PAD dalam daerah masing-masing. Semakin besar kemampuan daerah menggali potensi daerah, maka semakin optimal pula pelayanan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat (Zakiah, 2022).

Indonesia memiliki banyak potensi untuk mengembangkan industri pariwisatanya karena ribuan pulaunya, yang membentang dari Sabang sampai Merauke (Rosyadi, 2018). Pariwisata menjadi salah satu sektor yang berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi terhadap seluruh potensi wisata yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata, di mana setiap kabupaten dan kotanya menyuguhkan destinasi wisata dengan keunikan serta karakteristik yang berbeda-beda.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan kekayaan alam, budaya, dan sejarah yang melimpah. Dengan letak geografisnya mulai dari banyaknya pegunungan, dataran tinggi, hingga pantai, Provinsi Jawa Tengah menawarkan banyak pilihan wisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan. Wisatawan domestik dan mancanegara dapat tertarik jika potensi ini dikelola dengan baik. Adanya pengelolaan yang terstruktur pada daerah wisata ditunjukkan dengan berkembangnya kawasan objek wisata yang semakin maju (Anggrismono & Aviva, 2023). Seiring dengan kemajuan pengembangan kawasan objek wisata di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, diharapkan hal tersebut

dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan daerah, khususnya melalui bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).



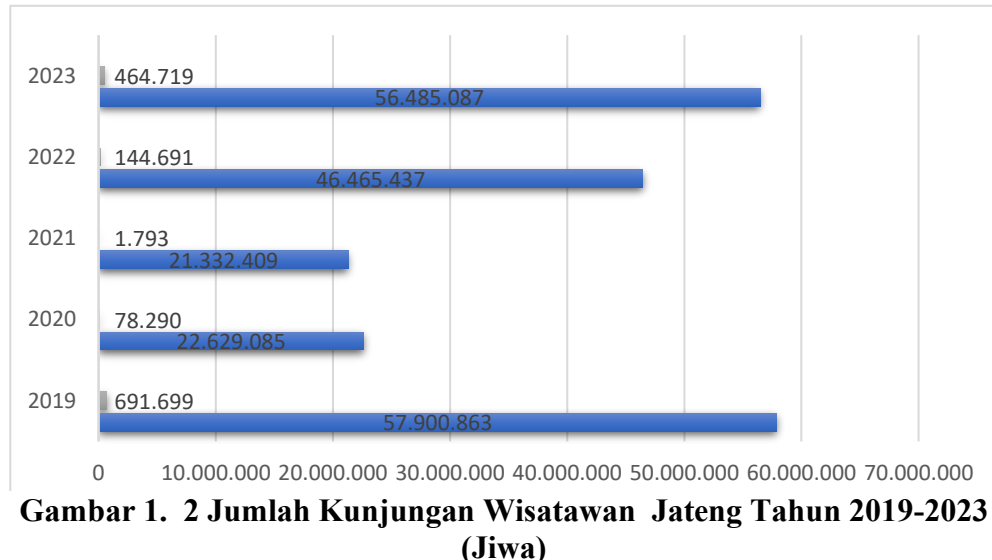
Gambar 1. 1 PAD Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, digambarkan PAD Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, namun tahun 2020 mengalami penurunan PAD yang disebabkan pandemi covid-19 sehingga menyebabkan terjadinya penurunan hampir di segala sektor ekonomi dan berdampak pada PAD Jawa Tengah di tahun tersebut.

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan PAD Jawa Tengah tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 10,68% lalu disusul tahun 2021 sebesar 7,52% dan pada 2023 sebesar 4,60% dimana pada tahun 2023 ini mengalami penurunan pertumbuhan PAD dibandingkan tahun 2022, dan yang

terkecil yaitu pada tahun 2020 dimana pada tahun ini mengalami penurunan yang sangat drastis mencapai -5,33%.



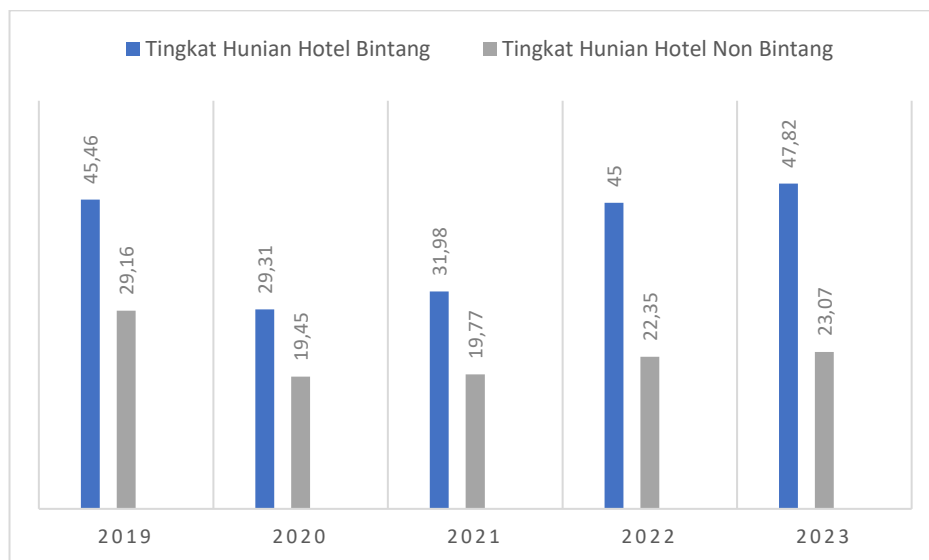
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa COVID-19 menyebabkan penurunan tajam dalam perjalanan domestik dan internasional pada tahun 2020 dan 2021 dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terjadi sebagai dampak dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menyebabkan penutupan sementara semua hotel dan objek wisata. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara terjadi peningkatan karena pandemi covid-19 sudah mulai mereda, namun angka tersebut masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan jumlah wisatawan pada tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa aktivitas pariwisata belum sepenuhnya kembali normal.

Dilihat dari grafik, jumlah wisatawan pada tahun 2019 sebanyak 58,59 juta jiwa yang terdiri dari 691 ribu wisman dan 57,90 juta wisnus. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah wisatawan sebanyak 22,71 juta jiwa yang terdiri dari 78 ribu wisman dan 22,63 juta wisnus, jumlah wisatawan ini mengalami penurunan sebesar 61,24% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2021 masih terjadi penurunan yang disebabkan oleh covid-19 dimana jumlah wisatawan sebanyak 21,33 juta jiwa yang terdiri atas 1,8 ribu wisman dan 21,33 juta wisnus, angka ini menunjukkan penurunan sebesar 6,47% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Tahun 2022 berangsur mengalami peningkatan dengan jumlah wisatawan mencapai angka 46,61 juta jiwa yang terdiri atas 144,69 ribu wisman dan 46,47 juta wisnus, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 54,24% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan dengan jumlah wisatawan mencapai 56,95 juta jiwa yang terdiri dari 464,72 ribu wisman dan 56,49 juta wisnus, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 21,49% jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Tingginya jumlah kunjungan wisatawan dapat mendorong masyarakat untuk membuka berbagai jenis usaha, khususnya di sektor pariwisata seperti perhotelan, yang menyediakan layanan akomodasi bagi para wisatawan. Aktivitas usaha ini berkontribusi terhadap penerimaan pajak hotel yang memberikan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah. Semakin banyak wisatawan, maka potensi peningkatan PAD akan meningkat pula. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewi, dkk. (2020) yang

menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan secara simultan memberikan pengaruh positif terhadap PAD.



Gambar 1. 3 Tingkat Hunian Hotel di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Persen)

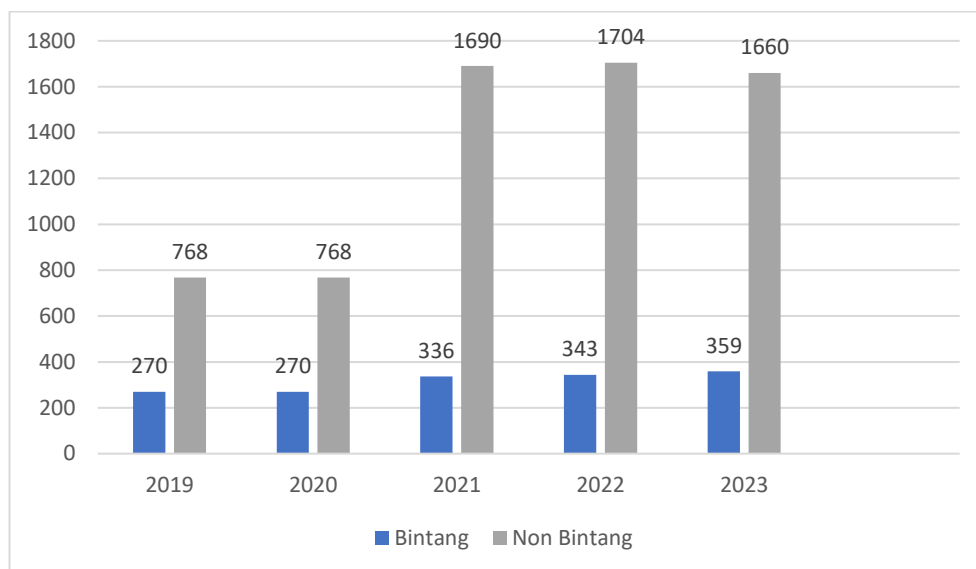
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.3 diatas merupakan tren tingkat hunian hotel di Jawa Tengah tahun 2019-2023. Grafik tingkat hunian hotel bintang pada tahun 2019 di seluruh Jawa Tengah menunjukkan angka 45,46% sedangkan pada tahun 2020 yaitu 29,31% dimana angka tersebut mengalami penurunan sangat drastis mencapai 16,15 poin jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2021 mencapai 31,98% yang menunjukkan terjadi sedikit peningkatan sebesar 2,67 poin dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2022 dan 2023 berangsur mengalami peningkatan yaitu mencapai 45,00% dan 47,82% dengan peningkatan

masing-masing sebesar 13,02 dan 2,82 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Grafik tingkat hunian hotel non bintang pada tahun 2019 di seluruh Jawa Tengah menunjukkan angka 29,16% sedangkan pada tahun 2020 yaitu 19,45% yang menunjukkan penurunan sebesar 9,71 poin dari tahun 2019. Pada tahun 2021 mencapai angka 19,77% dimana angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,32 poin dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2022 dan 2023 berangsur mengalami peningkatan yaitu mencapai 22,35% dan 23,07% dengan peningkatan masing-masing sebesar 2,58 dan 0,72 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan tingkat hunian hotel mencerminkan adanya kenaikan jumlah kamar yang berhasil disewa oleh tamu, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak hotel yang dibayarkan kepada pemerintah daerah. Kondisi ini secara langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Temuan ini selaras dengan hasil studi yang dilakukan oleh Pasaribu dan Woyanti (2024), yang mengungkapkan bahwa tingkat okupansi kamar hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Artinya, semakin tinggi tingkat hunian hotel di suatu daerah, maka semakin besar pula potensi penerimaan daerah dari sektor pajak hotel, yang secara tidak langsung memperkuat kemandirian fiskal daerah tersebut.



Gambar 1. 4 Jumlah Hotel di Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Unit)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.4 diatas adalah grafik jumlah hotel berbintang dan non berbintang di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2023. Berdasarkan grafik diatas, jumlah hotel di Jawa Tengah menunjukkan tren fluktuatif dari tahun 2019-2023. Naik turunnya grafik jumlah hotel tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti kebijakan pariwisata, pandemi covid-19, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Pendapatan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah hotel karena pajak hotel yang dihasilkan, seiring bertambahnya jumlah hotel maka PAD diantisipasi akan meningkat pula. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dewi, dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa jumlah hotel secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, hasil yang berbeda diperoleh dari hasil penelitian Asmisari, dkk. (2021) yang

menyimpulkan bahwa jumlah hotel tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD sektor pariwisata di Provinsi Jawa Tengah.

Merujuk pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pasaribu dan Woyanti (2024), diketahui bahwa secara simultan variabel jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian kamar hotel, serta pajak hotel dan restoran memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ketika dianalisis secara parsial, variabel jumlah wisatawan justru menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap PAD, sementara variabel tingkat hunian kamar hotel serta pajak hotel dan restoran tidak memberikan dampak yang signifikan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Aninda dan Ardiansyah (2022) menemukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan tingkat hunian hotel menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan Aceh, dkk. (2022) menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara tingkat hunian hotel tidak menunjukkan pengaruh positif terhadap PAD. Di sisi lain, hasil penelitian yang dilakukan oleh Aji dan Rieshe (2020) mengindikasikan bahwa secara simultan jumlah kunjungan wisatawan, penerimaan dari pajak hotel, serta pajak restoran secara bersama-sama memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Sikka selama periode 2016 hingga 2018.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asmisari, dkk. (2021), diketahui bahwa variabel jumlah wisatawan, jumlah restoran, serta jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah pada periode 2015–2019. Namun demikian, jumlah hotel tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PAD pada periode tersebut. Secara simultan, variabel jumlah wisatawan, jumlah restoran, jumlah hotel, dan jumlah penduduk terbukti bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2015–2019. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Erliyaton, dkk. (2023) mengungkapkan bahwa jumlah wisatawan tidak memberikan dampak signifikan terhadap PAD Kabupaten Sumenep pada kurun waktu 2015–2022, sedangkan jumlah objek wisata justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di wilayah tersebut. Akan tetapi, ketika diuji secara simultan, kedua variabel tersebut yakni jumlah wisatawan dan jumlah objek wisata tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sumenep selama periode yang sama.

Merujuk pada penjabaran latar belakang sebelumnya, tampak bahwa terdapat ketidaksesuaian hasil antara penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan studi lanjutan guna memperluas pemahaman mengenai permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, serta jumlah hotel memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2019 hingga 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang telah diuraikan dalam latar belakang, diketahui bahwa ketiga variabel independen tersebut menunjukkan pola perubahan yang tidak stabil atau berfluktuasi dari tahun ke tahun. Namun demikian, peningkatan PAD tidak selalu sejalan secara proporsional dengan pertumbuhan ketiga indikator tersebut. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana masing-masing variabel berpengaruh terhadap PAD. Oleh sebab itu, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
2. Apakah tingkat hunian hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
3. Apakah jumlah hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka berikut adalah beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui apakah tingkat hunian hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

3. Untuk mengetahui apakah jumlah hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pihak internal maupun pihak eksternal, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bentuk informasi serta perspektif baru mengenai pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, dan jumlah hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah.

- b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif untuk mendorong peningkatan PAD di kabupaten/kota di Jawa Tengah secara berkelanjutan.

2. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, diharapkan penulis memperoleh pemahaman mendalam mengenai keterkaitan antara sektor pariwisata dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah yang akan bermanfaat bagi penulis.

3. Bagi Umum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran penting sektor pariwisata dan fasilitas

penunjangnya, seperti hotel dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama yang saling berkaitan satu sama lain, sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan latar belakang yang melandasi dilakukannya penelitian, merumuskan masalah pokok yang hendak dijawab, dan pemaparan sistematika penulisan secara keseluruhan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memadukan berbagai teori yang relevan dengan topik studi dan menyusun kerangka pemikiran yang menjadi kandasian analitis untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam proses penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan variabel-variabel yang digunakan dan menjelaskan populasi dan sampel penelitian sebagai objek pengamatan serta mendeskripsikan metode analisis yang dipakai untuk mengolah sekaligus menginterpretasikan data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV memaparkan hasil analisis data yang telah diperoleh, serta menafsirkannya melalui pembahasan yang mengaitkan temuan dengan teori dan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. BAB V PENUTUP

Bab terakhir menyimpulkan temuan utama penelitian, mengemukakan keterbatasan yang dihadapi selama pelaksanaan penelitian, dan memberikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan.